

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	:	Enam Pemda Belum Berikan LHKPN
Entitas / Cakupan	:	Provinsi Jawa Barat
Sumber / Hal	:	Tribun Jabar/ Hal. 5
Edisi	:	Jumat, 13 April 2018

## Enam Pemda Belum Berikan LHKPN

ENAM pemerintah daerah di Jawa Barat belum memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ini disampaikan oleh Satgas Supervisi dan Pencegahan Wilayah II KPK, Asep Rahmat Suwanda, saat menghadiri Musrenbang Jawa Barat 2018, di Hotel Intercontinental, Bandung, Kamis (12/4).

Enam pemda tersebut adalah Pemprov Jawa Barat, Pemkab Kuningan, Pemkab Subang, Pemkab Sukabumi, Pemkab Banjar, dan Pemkab Tasikmalaya.

"Tadi saya tampilkan, pemda di Jawa Barat ini belum satu pun melaporkan LHKPN secara elektronik," ujarnya.

Asep mengatakan selain enam pemda tersebut, sudah ada pemda yang melaporkan LHKPN tapi belum 100 persen. Enam pemda yang disebut Asep adalah pemda yang jajarannya sama sekali belum melaporkan LHKPN.

"Artinya, yang wajib lapor mulai dari gubernur sampai jajarannya ke bawah," katanya.

Seharusnya LHKPN

dilaporkan ke KPK setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret. Ia mengatakan pelaporan LHKPN tidak lagi secara fisik tapi harus *online*.

"Padahal mudah, dari rumah juga bisa," ujarnya.

Selain memaparkan soal LHKPN, Asep juga memberi pemaparan mengenai sektor rawan praktik korupsi. Beberapa sektor yang rawan terjadi praktik korupsi adalah sektor perizinan, pendapatan, dan pengadaan barang dan jasa. (theofilus richard)